

Judul : 44 Penerima beasiswa LPDP tidak kembali ke Indonesia
Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

44 Penerima Beasiswa LPDP Tidak Kembali Ke Indonesia

Nama Dwi Sasetyaningtyas mendadak viral di media sosial setelah video curhatnya yang mengungkapkan kekecewaan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) menuai polemik. Sorotan publik menguat karena Dwi dan suaminya diketahui merupakan penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan kini tinggal di Inggris. Dalam video beredar, Dwi bangga anaknya memiliki paspor Warga Negara Asing (WNA). Pernyataan tersebut memicu kritik luas, terutama karena statusnya sebagai penerima beasiswa yang didanai negara.

Meski Dwi disebut telah menyelesaikan kewajiban masa pengabdian sebagai awardee LPDP, sang suami, Arya Iwantoro, tercatat belum menuntaskan kewajiban tersebut. Direktur Utama LPDP, Sudarto, mengungkapkan pihaknya telah melakukan penelitian terhadap lebih dari 600 penerima beasiswa. Dari jumlah itu, sebanyak 44 awardee tercatat tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi di luar negeri. "Yang sudah ditetapkan sanksi termasuk kewajiban pengembalian ada 8 orang, sementara 36 lainnya se-

dang dalam proses," ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026). Sudarto menjelaskan, dari 44 penerima LPDP tersebut, delapan orang telah dikenai sanksi, termasuk kewajiban pengembalian dana, sementara sisanya masih dalam tahap penanganan administratif. Di tengah polemik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut memberikan tanggapan. Ia menyatakan bahwa perpindahan kewarganegaraan merupakan hak individu, namun optimistik terhadap

masa depan Indonesia. "Mungkin 20 tahun lagi orang yang pindah kewarganegaraan itu akan menyesal karena kondisi Indonesia akan sangat bagus," ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudien, menegaskan bahwa isu ini harus disikapi dengan kepala dingin dalam kerangka kepentingan bangsa. Menurutnya, LPDP merupakan instrumen strategis negara dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul, sehingga ada ekspektasi publik agar penerimanya memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.

Berbeda, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap proses penerimaan beasiswa LPDP. Menurutnya, beasiswa LPDP jangan hanya dikhususkan bagi mereka yang pintar secara akademik tapi tumpul secara nasionalisme. "Harus ada perubahan sistem," terangnya. Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Hetifah Sjaifudien dan Ubaid Matraji terkait dengan kasus viralnya pengguna beasiswa LPDP di media sosial, berikut petikan wawancaranya.

HETIFAH SJAIFUDIEN, Ketua Komisi X DPR

Perlu Penguatan Nilai Kebangsaan



“LPDP adalah instrumen strategis negara untuk menyiapkan SDM unggul. Dana yang digunakan berasal dari dana publik, sehingga secara moral ada ekspektasi para penerimanya memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh.”

Publik dihebohkan dengan penerima beasiswa LPDP yang menyatakan kebanggaannya karena anaknya sudah jadi WNA. Apa pandangan Anda?

“Sebagai Ketua Komisi X DPR RI, saya memandang isu ini harus disikapi dengan kepala dingin tetapi tetap dalam kerangka kepentingan bangsa. LPDP adalah instrumen strategis negara untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul. Dana yang digunakan berasal dari dana publik, sehingga secara moral dan politik ada ekspektasi kuat dari masyarakat agar para penerimanya memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh.”

“Viralnya pernyataan tersebut tentu menimbulkan sensitivitas publik. Di tengah harapan besar agar para penerima beasiswa negara kembali dan berkontribusi bagi Indonesia,

namun yang terkesan menajuh dari semangat kelincahan bisa memunculkan kekecewaan. Ini harus dipahami sebagai alarm sosial, bukan semata-mata serangan personal. Namun kita juga perlu proporsional.”

Bagaimana dengan status kewarganegaraan anak pengguna beasiswa LPDP?

Status kewarganegaraan anak adalah ranah keluarga dan hak personal. Yang menjadi fokus negara adalah apakah penerima beasiswa memenuhi seluruh kewajiban kontraktualnya, kembali, dan mengabdikan sesuai ketentuan. Di situlah titik akuntabilitasnya.”

Ke depan apa yang perlu diperkuat? Ke depan yang perlu diperkuat bukan sekadar penambahan aturan

yang reaktif, melainkan penguatan pembinaan nilai kebangsaan, pengawasan kewajiban pas-studi, serta transparansi kontribusi alumni kepada publik. LPDP bukan hanya program pembiayaan studi, tetapi investasi kepentingan dan kapasitas nasional.”

Sebagai pimpinan Komisi X DPR yang membina pendidikan, apa sikap Anda?

Komisinya akan meminta penjelasan dan melakukan evaluasi bersama pengelola LPDP untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga. Setiap rupiah dana pendidikan harus kembali menjadi manfaat nyata bagi Indonesia, dan komitmen itu harus tercermin tidak hanya dalam kontrak, tetapi juga dalam sikap dan etika publik para penerimanya. ■ REN

UBAID MATRAJI, Koordinator Nasional JPPI

Harus Ada Perubahan Total Di Sistem LPDP



“LPDP sekarang ini seperti subsidi negara untuk kaum elit agar bisa jalan-jalan intelektual, sementara pendidikan bagi rakyat miskin sangat mengemaskan, beli pena dan buku saja mereka tak mampu.”

Apa pandangan Anda mengenai viralnya pernyataan penerima beasiswa LPDP di media sosial yang menuai polemik?

“LPDP sekarang ini seperti subsidi negara untuk kaum elit agar bisa jalan-jalan intelektual. Sementara pendidikan bagi rakyat miskin sangat mengemaskan, beli pena dan buku saja mereka tak mampu.”

Mereka hanya bisa menonton kemewahan beasiswa LPDP yang diukut oleh kaum elit di negeri ini. Bahkan mereka pun tak sedikit mengambil untuk negeri usai lulus. Parah sih ini. Pasti ada yang tidak beres dengan sistem LPDP ini.”

Ini ironis. Kita membiayai anak-anak paling pintar untuk sekolah ke luar negeri dengan harapan mereka pulang membangun bangsa, tapi sistem di dalam negeri sendiri tidak

siap menampung keahlian mereka. Akhirnya apa? Kita cuma jadi ‘paduk donatur’ otak untuk negara maju. Kita yang bayar sekolahnya, negara maju yang ambil urutannya.”

Menurut Anda apakah Pemerintah perlu melakukan evaluasi?

“Kalau ditanya perlu evaluasi atau pengawasan, jawaban saya: Sudah telat kalau cuma itu. Evaluasi itu sifatnya reaktif, sementara kebocoran di LPDP ini sistemik. Itu artinya kita punya kapal mewa yang bocor di mana-mana, tapi Pemerintah cuma sibuk ngawasi air yang masuk pakai gayung, bukan nambal lambungnya.”

Masalahnya bukan cuma soal alumni yang ‘bandel’ nggak mau pulang, tapi soal sistem yang buta arah. Kita ini menghamburkan triliunan rupiah uang rakyat untuk membiayai

gelar menteri, tapi negara sendiri nggak punya blueprint mau diarah di mana mereka setelah lulus.”

Lantas, apa yang harus diperbaiki? Harus ada perubahan di sistem LPDP kita. Pertama, stop ‘Beasiswa Jalan-Jalan’. Seleksi jangan cuma adu pintar bahasa Inggris atau adu keren esai. Sistem harus diubah.

Kedua, harus demand-driven. Kirim orang sekolah hanya untuk bidang yang industrinya mau kita bangun, bukan kerusi orang untuk ilmu yang di Indonesia pun pasarnya nggak ada. Ketiga, hapus diskriminasi terselektif. Sistem sekarang itu subsidi negara untuk kaum elit yang sudah punya akses. Orang desa yang cerdas tapi kalah di slow TOEFL, tetap tertinggal. Kita ini membiayai ketidaksihlian sosial yang dibayai APBN. ■ REN